

**PELAKSANAAN PASAL 64 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT DENGAN
PENDAFTARAN PERNIKAHAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
(STUDI DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA)**

Ria Ayu Cahyaning Pratiwi, Agus yulianto, SH. MH ; Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : riaayu1808@gmail.com

ABSTRACT

RIA AYU CAHYANING PRATIWI, Administrative , Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, The implementation of 64 article (2) verse and law number 23, 2006 year about demography administration related wedding registration for community trusting , Agus Yulianto, SH. MH ; Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

The implementation of 64 article (2) verse and law number 23, 2006 year about demography administration related wedding registration for community trusting. The purpose of the study in this thesis is to know The implementation of 64 article (2) verse about demography administration related wedding registration for community trusting, The experienced of constraints and efforts by population and civil registration department of Surabaya in implementation that verse. The goverment solution in implementation of that verse to the community trusting. The method of this study is Yuridis empiris, all of the data to be analysed by analysis descriptive . Based on the result of the research, the writer get all of the answer fron research problems that the implementation of 64 article (2) verse, 2006 year appropriate with the situation in the society.

ABSTRAKSI

RIA AYU CAHYANING PRATIWI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, Pelaksanaan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Pendaftaran Pernikahan Bagi Penghayat Kepercayaan, Agus Yulianto, SH. MH ; Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Pelaksanaan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Pendaftaran Pernikahan Bagi Penghayat Kepercayaan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 64 ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan dengan pencatatan atau pendaftaran pernikahan bagi penghayat kepercayaan, kendala dan upaya yang di alami pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam melaksanakan pasal tersebut, solusi pemerintah dalam menangani pelaksanaan pasal tersebut ke masyarakat penghayat atau penghayat kepercayaan. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris, seluruh data di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas masalah yang ada, bahwa pelaksanaan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajemukan dalam wujud Bhineka Tunggal Ika

ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita. Kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.

Arti penting agama yang kini kembali telah mengangkat isu kebebasan beragama atau berkeyakinan ke panggung utama. Pada ranah budaya, pentingnya persoalan ini tampak sangat jelas dalam ketegangan antara klaim kaum partikularis dan pandangan bahwa hak asasi manusia secara murni bersifat universal. Beberapa persoalan yang paling dipertentangkan dalam konteks ini muncul dengan tepat dibidang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini meliputi isu penyebaran agama, hak untuk mengubah agama seseorang. Kebuntuan dalam isu-isu budaya ini membantu menjelaskan mengapa Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan tahun 1981 telah menjadi beku tanpa mampu berkembang menjadi konvenan yang memiliki kekuatan meningkat. Serupa dengan hal ini, konferensi dunia di Wina tentang universalitas atau partikularis hak asasi manusia. Deklarasi ini hanya mengakui ketidaksepahaman lewat bahasa komprominya, memberikan pengakuan lebih lanjut terhadap universalitas hak asasi manusia sementara pada saat bersamaan juga menerima partikularitas budaya dan agama.¹ Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat salah satunya adalah 6 agama

¹ The Vienna Declaration and Programme of Action menyatakan dalam paragraf 5 petunjuk pelaksanaan, "Seluruh hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi dan saling bergantung serta saling terkait.....

Sementara arti penting partikularitas nasional dan regional dan sejumlah latar belakang sejarah, budaya serta agama harus diingat, adalah kewajiban negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk mempromosikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia serta

yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Konghucu. Pada saat ini 6 agama yang diakui oleh negara tersebut telah dipemasalahkan oleh masyarakat maupun ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 64 ayat (2) yang menyatakan “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Semenjak itu banyak yang mengatakan bahwa kebebasan beragama telah dibatasi dengan peraturan yang di sebutkan pada pasal 64, warga negara Indonesia tidak boleh menganut agama lain selain 6 (enam) agama yang diakui oleh negara. Pada UUD 1945 pasal 28E ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama da kepercayaannya. Diwilayah Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat yang menganut agama lain selain 6 (enam) agama yang diakui oleh negara, khususnya di daerah Jawa Timur banayak yang menganut aliran selain Islam.

Pro dan kontra yang terjadi atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 salah satunya pada pasal 64 ayat (2) tersebut. Tetapi selama perubahan itu disahkan belum ada KTP yang kolom agamanya dikosongkan karena tidak menganut 6 agama yang diakui oleh negara. Jadi pelaksanaan pasal tersebut belum diketahui dengan jelas dan pasti adanya, apakah sudah diterapkan oleh pemerintah

atau belum saat ini masih menjadi pertanyaan. Efektif atau tidak tentang di sahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 64 ayat (2) masih belum tahu, tetapi masyarakat banyak yang mempermasalahkan masalah peraturan yang baru dalam KTP tentang agama yang tidak harus dicantumkan apabila tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui oleh negara.

Hal ini yang menjadi topik hangat pada saat ini, karena bagi masyarakat Indonesia. agama merupakan hal yang penting dalam hidup sehari-harinya, agama juga menjadi pedoman hidup manusia, tanpa agama manusia bisa kehilangan arah dan tujuan hidupnya, tidak bisa beribadah sesuai dengan yang mereka yakini selama hidup. Tetapi ada juga yang setuju dengan keputusan pemerintah yang tidak mewajibkan masyarakat mencantumkan agama di KTP apa bila tidak termasuk 6 (enam) agama yang diakui oleh negara. Karena mereka berfikir agama itu adalah keyakinan seseorang terhadap tuhan mereka yang tidak perlu atau tidak wajib dipublikasikan kepada orang banyak. Agama adalah suatu hal yang sangat sensitif untuk di singgung, karena di indonesia banyak sekali aliran atau faham yang dianut oleh masyarakat, semua orang ingin pendapat dan fahamnya benar tanpa ada orang yang mempermasalahkan atau menyalahkan pendapat yang diyakini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan ?

2. Bagaimana kendala dan upaya pemerintah dalam menerapkan pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan ?

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². Jenis penelitian yang saya gunakan adalah hukum empiris, berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan mengabungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Surabaya, yaitu di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Kota Surabaya

Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Kota Surabaya karena wilayah Kota Surabaya merupakan daerah yang sangat luas, maka banyak pula permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kota surabaya, permasalahan pengurusan administrasi kependudukan dan permasalahan tidak dicantumkan agama apabila masyarakat

² Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, kencana prenada media group, Jakarta. Hlm 35

tersebut tidak menganut 6 agama yang telah diakui oleh negara hal inilah yang menjadi obyek penelitian penulis dan kasus tidak dicantumkannya agama di dalam kartu tanda penduduk (KTP) apabila aganya tidak diakui oleh negara.

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintahan non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Di Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut saya mengambil data-data penduduk Jawa Timur untuk mengetahui besarnya jumlah masyarakat Kota Surabaya yang menganut agama diluar agama yang telah diakui oleh negara.

3. Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya

Kantor Catatan Sipil merupakan suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti: perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak. Yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkapny mungkin peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis lakukan dilapangan, berupa hasil wawancara dengan sampel penelitian, mengenai tidak dicantumkannya agama apabila masyarakat tersebut tidak menganut 6 (enam) agama yang diakui oleh negara. Tetapi pada dasarnya akan tetap dilayani oleh pemerintah dalam mengurus data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku literatur, koleksi perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat data dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (interview), yaitu salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah diambil dari pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya yang diambil beberapa orang sebagai perwakilan.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara :
 1. Studi Kepustakaan
Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.
 2. Studi Dokumentasi
 - a. Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotocopy dokumen serta catatan penting yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur selain itu juga mengunduh dari internet.

- b. Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

PELAKSANAAN PASAL 64 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN. (STUDI DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA)

- 1. Pelaksanaan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan.**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pada pasal 64 ayat (2) bahwa “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”. Dengan adanya perubahan di dalam pasal 64 ayat (2) tersebut

pemerintah daerah harus tetap melayani dengan baik sesuai peraturan yang sudah termuat dalam Undang-Undang, tanpa membedakan antara satu sama lain.

Administrasi Kependudukan Adalah Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika suatu saat dibutuhkan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya telah melakukan perintah yang ada dalam peraturan yang telah dimuat dalam Undang-Undang, tanpa membedakan antara penganut kepercayaan dengan penganut 6 agama yang telah diakui oleh negara. Jadi pelaksanaan pasal 64 ayat 2 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlaksana dengan baik, penjelasan yang diberikan oleh peawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya :

“Kami sebagai pegawai dinas telah melayani masyarakat kota Surabaya yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai mana mestinya, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 bab X pasal 81 :

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”³

³ Hasil wawancara dengan sub bagian kependudukan dan catatan sipil kota surabaya bapak Andoko pada tanggal 14 juli 2014

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipastikan bahwa masyarakat yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai peraturan yang sudah ada, mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan para pemeluk atau penganut agama yang lainnya. Dasar-dasar perkawinan yang digunakan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pendaftaran perkawinan yang terjadi pada masyarakat penganut kepercayaan Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir sebanyak 3 (tiga) pasang suami istri yang mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dari 2.891 masyarakat yang menganut kepercayaan atau penganut kepercayaan di kota Surabaya yang mendaftarkan diri ke Dinas hanya 3 (tiga) pasang suami istri dari tahun 2011 sampai dengan 2014 diantaranya yaitu⁴ :

- a. Tahun 2011 : pada tanggal 1 Nopember 2011
(satu pasangan pasutri)
- b. Tahun 2012 : pada tanggal 10 November 2012
(satu pasangan pasutri)
- c. Tahun 2013 : pada tanggal 16 Oktober 2013
(satu pasangan pasutri)
- d. Tahun 2014 : (tidak ada)

Pada tahun 2014 belum ada yang mendaftarkan diri sebagai pasangan suami istri yang mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Pada dasarnya pelayanan yang dilakukan kepada seluruh masyarakat kota Surabaya sama semua, tidak memandang status agama maupun derajat yang mereka miliki, semua akan dilayani dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

Perubahan pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang baru-baru ini sudah disahkan tidak begitu merubah kinerja para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, karena sebelum ada peraturan tersebut, masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penganut penganut kepercayaan tetap dilayani dalam melakukan Administrasi kependudukan diantaranya adalah pencatatan perkawinan, pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Akta Kelahiran, dan

⁴ Hasil wawancara dengan sub bagian kependudukan dan catatan sipil kota surabaya bapak Andoko pada tanggal 14 juli 2014

lain-lain. Tetapi dengan adanya perubahan peraturan dalam undang-undang tersebut, pemerintah lebih giat dalam melakukan pelayanan publik untuk masyarakat penghayaat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

2. Kendala pemerintah dalam menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayaat Kepercayaan.⁵

Dalam melaksanakan atau menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak mendapat kendala apapun dalam melayani masyarakat kota Surabaya yang ingin mendaftarkan perkawinannya ke kantor Catatan Sipil. Hanya saja masyarakat Kota Surabaya yang menganut penghayaat kepercayaan kurang mengeksplor dirinya ke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Semua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan atau melaksanakan tuganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada pasal 64 ayat (2) sudah dijelaskan yaitu⁶ :

“keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Dari peraturan tersebut pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berani melanggarnya, karena sudah ada peraturan yang menjelaskannya. Para penganut atau penghayaat kepercayaan juga

⁵ Hasil wawancara dengan sub bagian kependudukan dan catatan sipil kota surabaya bapak Andoko pada tanggal 14 juli 2014

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sudah memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat yang memeluk agama lainnya seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Konghucu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah dijelaskan pada pasal 81 yaitu⁷ :

- 1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi kendala adalah kurangnya informasi kepada masyarakat yang menganut kepercayaan atau penghayat keperayaan, bahwa sudah ada peraturan yang mengatur tentang administrasi kependudukan bagi mereka. Maka dari itu masyarakat penghayat kepercayaan jarang yang mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya di daerah Kota Surabaya.

3. Upaya pemerintah dalam menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan.

Dalam menangani permasalahan yang ada dalam masyarakat penganut kepercayaan yang kurang mengetahui informasi yang ada dalam peraturan-peraturan yang sudah disahkan pejabat yang berwenang. Mengenai peraturan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

khususnya Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya untuk menyalurkan informasi ke masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan dengan berbagai cara atau solusi diantaranya yaitu :

1. Dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
2. Melakukan pemberitahuan secara langsung terhadap masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
3. Memberi pembelajaran terhadap masyarakat, supaya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa cara atau solusi yang dilakukan pemerintahan kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berharap agar masyarakat Kota Surabaya akan mengetahui tentang peraturan-peraturan yang sudah ada untuk mempermudah pencatatan perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan, sehingga perkawinan yang sudah dilakukan dapat terdaftar di negara atau tercatat dalam negara. Sehingga masyarakat tidak hanya tercatat dalam pemuka agama atau dibawah tangan.

Dari semua upaya dan solusi sudah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya kepada masyarakat Kota Surabaya yang menganut penghayat kepercayaan. Sekarang tinggal masyarakatnya sendiri yang menyikapi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Pemerintah sudah berusaha tetapi masyarakatnya tidak begitu merespon tentang peraturan tersebut ya mau gimana lagi, semua dikembalikan kepada masyarakatnya apakah mereka ingin mencatatkan pernikahannya atau tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang tertulis.
2. Kendala pemerintah dalam menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam melaksanakan atau menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak mendapat kendala apapun dalam melayani masyarakat kota Surabaya yang ingin mendaftarkan perkawinannya ke kantor Catatan Sipil.

Semua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan atau melaksanakan tuganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada pasal 64 ayat (2) sudah dijelaskan yaitu : “keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

3. Upaya pemerintah dalam menerapkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terkait dengan Pendaftaran Pernikahan bagi Penghayat Kepercayaan. Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya untuk menyalurkan informasi ke masyarakat Kota Surabaya yang menganut

kepercayaan atau penghayat kepercayaan dengan berbagai cara atau solusi diantaranya yaitu :

1. Dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
2. Melakukan pemberitahuan secara langsung terhadap masyarakat Kota Surabaya yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
3. Memberi pembelajaran terhadap masyarakat, supaya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa cara atau solusi yang dilakukan pemerintahan kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berharap agar masyarakat Kota Surabaya akan mengetahui tentang peraturan-peraturan yang sudah ada untuk mempermudah pencatatan perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan, sehingga perkawinan yang sudah dilakukan dapat terdaftar di negara atau tercatat dalam negara. Sehingga masyarakat tidak hanya tercatat dalam pemuka agama atau dibawah tangan.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi-informasi yang akurat terhadap masyarakat Kota Surabaya akan pentingnya pencatatan perkawinan kepada instansi terkait atau petugas yang berwajib.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat Kota Surabaya mengenai tata cara untuk mendaftarkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mengenal lebih dekat masyarakat Kota Surabaya khususnya warga penghayat kepercayaan untuk menyalurkan hak-hak yang dimiliki warga penghayat kepercayaan, bahwa mereka mempunyai hak yang sama seperti masyarakat Kota Surabaya yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Afan Gaffar, dkk, **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**, Ctk Pertama, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Anton Yudi Setianto, S.H, L. Jehani, S.H., Niko Budiman, S.Ag., L. Jehadun, SE, Agnes N. 2008, **Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen**. Forum Sahabat, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
- Bambang Supriyadi, **Proposal Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal**, 2007.
- Daryanto S.S, **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, Apollo, Surabaya, 1997
- Djohan Effendi, **merayakan kebebasan beragama, bunga rampai 70 tahun Djohan Effendi**, ICRP (indonesian Conforance On Relligion and Pesca) bekerja sama dengan Kompas Amazon, Jakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma. **Hukum Perkawinan Indonesia**. CV. Mandar Maju. Bandung. 2007.
- Inu Kencana Syafiie, **Ilmu Administrasi Publik**. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. **Penelitian Hukum**, kencana prenada media group, Jakarta.
- Prawiro H Ruslan Drs, 1983. **Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah**, Bandung Alumni.
- Rachmadi Usman, **Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia**. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Saidhihardjo Drs, 1974. **Dasar-dasar Kependudukan**, Bursa Buku Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

The Liang Gie, **Administrasi Perkatonran Modern**. Nur Cahaya, Yogyakarta, 1983.

The Liang Gie, **Ilmu Administrasi**. Liberty, Yogyakarta.

The Vienna Declaration and Programme of Action menyatakan dalam paragraf 5 petunjuk pelaksanaan, “Seluruh hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi dan saling bergantung serta saling terkait.....

Sementara arti penting partikularitas nasional dan regional dan sejumlah latar belakang sejarah, budaya serta agama harus diingat, adalah kewajiban negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk mempromosikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia serta kebebasan yang fundamental.”

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007. **Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoretis**, Jakarta IMTIMA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang **Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**.

Internet

<http://E:/skripsi/1002512-kolom-agama-di-ktp-masih-dipersoalkan.htm>, (diakses pada tanggal 25 Desember 2013, pukul 10.00 WIB)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa>, (diakses pada tanggal 25 februari 2014, pukul 14.41)

Skripsi

Geizela Prima Sekarimasakti. 2011, *Alasan Penolakan Permohonan Izin Cerai Oleh Atasan, Relevansinya Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian PNS Tanpa Izin (Studi di Kota Malang)* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universita Brawijaya. Malang.